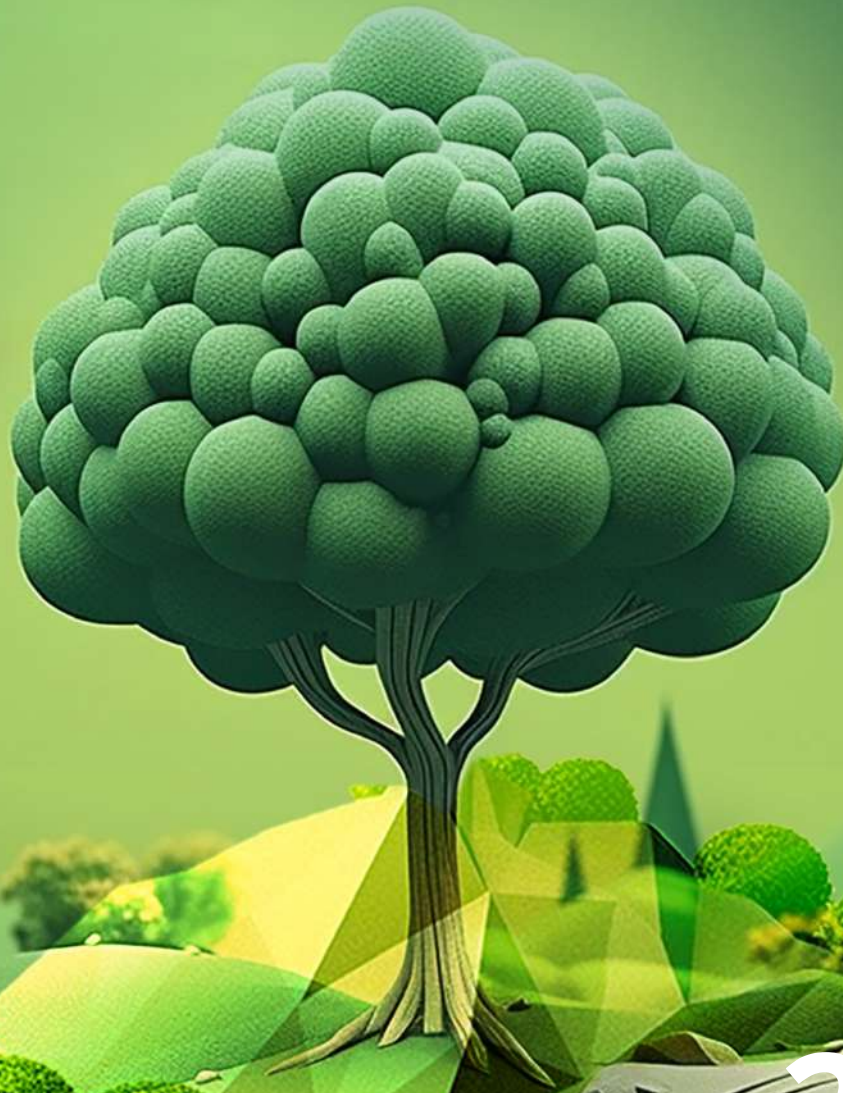




PT. BPR Sungkunandhana



2024
LAPORAN
KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY
REPORT

Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan	1
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan	8
3. Profil Bank	13
4. Penjelasan Direksi	16
5. Tata Kelola Keberlanjutan	20
6. Kinerja Keberlanjutan	25
6.1. Kinerja Ekonomi	25
6.2. Kinerja Sosial	27
6.3. Kinerja Lingkungan Hidup	28
6.4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	29
Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen	31
Umpan Balik	31

Kata Pengantar

Di tahun 2024, BPR Sungkunandhana telah melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024 sesuai POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. BPR Sungkunandhana menerapkan program- program kerja yang disusun dalam RAKB sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

BPR (Bank Perekonomian Rakyat) sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyadari pentingnya isu pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip *triple bottom line* yaitu *people* (kesejahteraan masyarakat), *profit* (keuntungan) dan *planet* (lingkungan hidup) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST).

BPR Sungkunandhana sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat, BPR dituntut untuk bisa selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur dengan menghindarkan pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup, fokus pada usaha debitur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga BPR mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga kredit.

Dalam hal ini BPR Sungkunandhana berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagai langkah bersama bagi Sektor Jasa Keuangan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut Keberlanjutan Bank sebab ketidakpedulian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial dapat meningkatkan risiko bagi Perbankan khususnya peningkatan risiko kredit akibat kegagalan bayar (*default*) debitur yang memiliki usaha berdampak negatif terhadap lingkungan dan kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Keberlanjutan (SR - *Sustainability Report*) BPR Sungkunandhana Tahun 2024 ini berisi informasi mengenai kinerja keberlanjutan Bank dalam bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial kepada seluruh pemangku kepentingan. BPR Sungkunandhana dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar, sebagaimana ketentuan dari OJK untuk pertama kali menyusun Laporan Keberlanjutan di tahun 2025 yaitu Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 dan wajib disampaikan ke OJK secara luring (*offline*) paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan yang berlaku. Dengan demikian BPR Sungkunandhana menyusun Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 yang memuat informasi untuk periode pelaporan 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Pedoman Teknis Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017.



1.

Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan

Tentang Laporan Keberlanjutan



Sesuai POJK No. 51 /POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif mewajibkan BPR/ BPRS untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk itu BPR/BPRS wajib menyusun dan **menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) atau SR (*Sustainability Report*) Tahun 2024 ke OJK paling lambat tanggal 30 April 2025** bersamaan dengan Laporan Tahunan BPR/BPRS Tahun 2024.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Mengacu pada Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bahwa format penulisan Laporan Keberlanjutan sebagai berikut:



1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan
2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup)
3. Profil Singkat BPR/BPRS
4. Penjelasan Direksi
5. Tata kelola keberlanjutan
6. Kinerja keberlanjutan
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen
8. Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca dan
9. Tanggapan BPR/BPRS terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.



Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan BPR Sungkunandhana tahun 2024 disusun dengan mengkomodir standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini tidak lepas dari laporan tahunan yang telah disusun dengan laporan keuangan teraudit untuk tahun buku 2024. BPR Sungkunandhana membuat dan melaporkan kinerja keberlanjutan dalam periode 1 (satu) tahun buku (tahunan) mulai tahun 2024 ini. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan BPR Sungkunandhana tahun 2024 ini



memuat data dan informasi yang dikumpulkan dalam 1 (satu) tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Prinsip penetapan konten dalam Laporan ini didasarkan pada POJK 51/ POJK.03/2017 dan disusun berdasarkan 2 prinsip, yaitu prinsip isi dan kualitas.

Prinsip isi meliputi:

1. Konteks berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) ini disusun sejalan dengan konteks keuangan berkelanjutan.
2. Kelengkapan: Informasi disajikan sebagai informasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan kelengkapan bagi pembaca.

Prinsip kualitas adalah:

1. Keseimbangan: Informasi terkait capaian dan prestasi, serta tantangan disampaikan sesuai dengan kondisi perusahaan.
2. Komparabilitas: Data yang disampaikan dalam laporan disajikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Akurasi: Angka dan informasi telah diperiksa secara internal Bank sehingga diyakini akurasi.
4. Ketepatan waktu: Laporan ini disajikan tepat waktu bersama dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan: Informasi yang disajikan dalam laporan mudah untuk dipahami.

Topik material dalam Laporan ini adalah topik-topik yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Penetapan aspek material dan batasan didasarkan pada isu-isu yang berpengaruh signifikan bagi BPR Sungkunandhana serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR mengacu pada 8 (delapan) Prinsip keuangan berkelanjutan, dan 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/2017. Delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang dikembangkan oleh BPR Sungkunandhana adalah:

1. **Investasi yang bertanggung jawab;** adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi yang bertujuan agar dapat mengelola risiko secara lebih baik. Kami menerapkan prinsip ini melalui pemberian kredit yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dengan menganalisis potensi risiko yang ditimbulkan dari usaha yang dibiaya oleh Bank.
2. **Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan;** Kami menerapkan prinsip ini dengan menuangkannya pada kebijakan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) yang menjadi landasan BPR Sungkunandhana dalam menjalankan bisnis berkelanjutan di kegiatan usaha Bank.



3. **Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup;** Kami telah memiliki prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam mengukur risiko yang dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Bank. Selain risiko-risiko finansial, kami juga melakukan proses manajemen risiko khususnya mengukur risiko pemberian kredit atau pinjaman yang bersentuhan langsung dengan aspek sosial dan lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
4. **Prinsip Tata Kelola;** Kami menerapkan tata kelola keberlanjutan (ekonomi, lingkungan dan sosial) yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan kewajaran.
5. **Prinsip Komunikasi yang Informatif;** Kami menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek Bank yang dapat dengan mudah diakses oleh para *stakeholder* melalui situs web BPR Sungkunandhana <https://www.bprgodital.co.id>
6. **Prinsip Inklusif;** Bank menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/ atau jasa yang dapat dengan mudah diakses oleh nasabah. Bank memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan yang keuangan BPR Sungkunandhana.
7. **Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas ;** Dalam menyusun program keberlanjutan, kami mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah kami tetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Hal ini kami lakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung program pemerintah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. **Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi;** Kami membuka diri untuk berkomunikasi dan berkerja sama dengan lembaga atau pemerintahan setempat terkait Bisnis Berkelanjutan dalam rangka penyelarasan strategi keberlanjutan Bank. Hal ini terlihat dari keanggotaan perusahaan pada perbarindo dan partisipasi dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang memberdayakan masyarakat.



Sedangkan **tiga prioritas RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)** adalah:

1. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, antara lain mengidentifikasi dan memonitor portofolio pembiayaan Bank yang menunjang keuangan berkelanjutan.
2. Pengembangan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan meningkatkan *awareness* mengenai keuangan berkelanjutan (untuk pegawai dan nasabah), implementasi keuangan berkelanjutan pada sektor-sektor usaha yang menjadi fokus Bank.
3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar prosedur operasional, antara lain menyiapkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan, penyesuaian kebijakan internal Bank lainnya seperti Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, Kebijakan tata kelola keberlanjutan.



Strategi Keberlanjutan

Strategi keuangan berkelanjutan disusun berdasarkan pertimbangan visi dan misi Bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Bagi Bank, penerapan keuangan berkelanjutan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun juga sebagai strategi untuk mewujudkan visi Bank khususnya dalam penerapan prinsip inklusi keuangan.

Segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang menjadi sasaran utama Bank dalam pelayanan jasa keuangan diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Selain itu, melalui pengembangan produk dan/ atau jasa keuangan berwawasan lingkungan, Bank berupaya meningkatkan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs - *Sustainable Development Goals*). Hal ini diwujudkan dalam berbagai upaya, di antaranya dengan menyusun rencana kerja, dan mengembangkan RAKB sesuai dengan ketentuan regulator.



Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas, BPR Sungkunandhana mulai menerapkan prinsip-prinsip *go green company* sejak penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1. Mengampanyekan efisiensi penggunaan air di setiap toilet yang berada di lingkungan kantor BPR dengan memasang pamflet ""Gunakan air seperlunya", "Hemat air", atau "Matikan air setelah selesai digunakan".
2. Mengampanyekan lingkungan kerja menjadi lebih sehat dengan motto "BERSIH itu SEHAT" dengan memasang pamflet di tempat-tempat yang mudah terlihat. .
3. Menjalankan program "Hemat Energi" dengan pembatasan penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja dan mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.
4. Program penggunaan *tumbler* sebagai pengganti gelas air minum atau air dalam kemasan.





2.

Ikhtisar Aspek Keberlanjutan

Aspek Ekonomi

Tabel 2.1 Ikhtisar Kinerja Aspek Ekonomi

Nominal uang dalam jutaan rupiah

Keterangan	2024	2023	2022
Pendapatan Operasional Bank (Rp)	14.460.642.426	13.638.368.556	14.575.666.460
Laba Bersih Bank (Rp)	4.057.163.760	3.375.641.926	4.138.439.949
Kinerja Aspek Ekonomi terkait Keberlanjutan			
Jumlah jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan	3	3	3
Nominal produk penghimpunan dana yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)	6.273.971.013	6.827.695.788	6.705.407.122
Nominal produk penyaluran dana yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)	30.822.415.859	27.321.318.000	28.409.144.000
Persentase total portofolio kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total portofolio (%)			
a. Penghimpunan Dana (%)	21,59	24,48	23,85
b. Penyaluran Dana (%)	89,22	87,61	89,33
Kinerja Keuangan Inklusif			
Perkembangan Laku Pandai			
a. Jumlah Agen	0	0	0
b. Nominal produk dan/atau jasa yang disediakan oleh Agen	0	0	0



Pemberian layanan keuangan di segmen UMKM, yang menjadi fokus utama Bank, merupakan segmen pasar yang sangat potensial. UMKM, yang termasuk dalam salah satu kategori KUB (Kategori Usaha Berkelanjutan), saat ini telah menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip investasi bertanggung jawab dimana Bank mempertimbangkan peningkatan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasabah dalam penyaluran dana.



Aspek Lingkungan Hidup

Tabel 2.2 Ikhtisar Kinerja Aspek Lingkungan Hidup

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	2024	2023	2022
Beban Penggunaan Kertas (Rp)	54.340.600	51.451.800	50.990.400
Beban Penggunaan Listrik (Rp)	80.393.466,65	74.724.949,25	71.740.052,70
Beban Penggunaan Air (Rp)	14.187.082,35	13.186.755,75	12.660.009,30
Beban Penggunaan BBM (Rp)	254.724.956	256.847.100	218.842.200

Kriteria KUB (Kredit usah Berkelanjutan) yang diharapkan untuk didukung oleh lembaga keuangan mencakup efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Bank menyadari bahwa untuk mendorong masyarakat mengembangkan kegiatan usaha yang mempertimbangkan dampak lingkungan harus dimulai dari cara Bank beroperasi.



Sebagaimana tercantum pada RAKB 2024, Bank telah menempatkan operasional bank ramah lingkungan sebagai bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan. Dalam rangka memastikan kegiatan operasional dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, budaya kesadaran lingkungan penting untuk dibangun di dalam Bank. Oleh karena itu, Bank berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan data lingkungan di Kantor pada tahun 2024.

Dalam hal operasi ramah lingkungan, sosialisasi telah dilaksanakan di lingkungan kantor dan selain itu, Bank juga telah menerbitkan Surat Kewaspadaan yang berisi informasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari budaya perusahaan terkait dengan peduli lingkungan.

Efisiensi Penggunaan Kertas

Kertas merupakan kebutuhan penting dalam operasional Bank. Kertas antara lain dipakai untuk administrasi perkantoran, seperti surat-menyurat, memo, mencetak berbagai laporan perusahaan, pendaftaran, dan pencetakan buku nasabah, pencatatan transaksi setoran, penarikan dan lain-lain. Bank menyadari bahwa bahan baku kertas adalah bubur kayu yang didapat dari penebangan kayu. Karena itu, Bank berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penghematan penggunaan kertas. Dengan penghematan kertas, maka Bank turut mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, seperti penebangan pohon dan emisi gas rumah kaca.

Tahun 2024, beban pembelian kertas di Bank secara umum mengalami penurunan dari nominal Rp 52 juta tahun 2023 menjadi Rp 44 juta di tahun 2024. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan kertas bekas (sisi sebaliknya) untuk mencetak draft surat/memo.

Ke depan dengan adanya penerapan digitalisasi pelaporan yang dicanangkan oleh OJK melalui POJK No. 23 Tahun 2024 yang menggeser penyampaian laporan secara luring (*offline*) menjadi daring (*online*) membantu Industri BPR untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).

Efisiensi Penggunaan Listrik

Listrik digunakan untuk penerangan, penggerak sarana- prasarana kantor seperti mesin fotokopi, AC, Komputer dan sebagainya. Bank menyadari bahwa sebagian besar listrik yang dipakai saat ini bersumber dari PLTU, yang menggunakan batu bara sebagai sumber pembangkit, yang termasuk sumber energi tak terbarukan. Oleh karena ketersediaan listrik semakin terbatas, Bank berupaya untuk melakukan efisiensi sehingga tidak terjadi pemborosan energi.

Berdasarkan tabel diatas terlihat pemakaian listrik selama tiga tahun terakhir di Bank Kantor mengalami penurunan, sehingga program hemat energi yang dicanangkan Bank dapat terlaksana dengan baik.

Efisiensi Penggunaan Air



Bank telah memulai inisiatif sederhana dalam upaya efisiensi penggunaan air dengan menumbuhkan kesadaran untuk menghemat air melalui pemasangan stiker dan poster di lokasi dimana air bersih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai.

Efisiensi Penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak)

BBM dipakai juga untuk kendaraan operasional kantor. Sementara itu, selain dipakai untuk menggerakkan genset, BBM dipakai juga untuk kendaraan operasional kantor. Kategori yang sama berlaku untuk jenis BBM yang digunakan Bank, yaitu bensin dan solar.



Aspek Sosial

Tabel 2.3 Ikhtisar Kinerja Aspek Sosial

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	2024	2023	2022
Dana Sosial Yang Disalurkan	0	0	0

Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) haruslah senantiasa ditanamkan kepada seluruh pegawai agar dapat menjadi budaya yang mampu mendukung keberlanjutan operasional Bank. K3 merupakan aspek penting yang wajib diterapkan di seluruh kegiatan operasi, dalam bekerja dengan sesama pegawai, melayani nasabah, bahkan berinteraksi dengan keluarga maupun orang lain.



Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat berkontribusi untuk mendukung iklim kerja yang kondusif sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Guna memastikan hal ini, peran pegawai sangatlah penting. Oleh karena itu Bank melibatkan pegawai dalam strategi dan kebijakan terkait K3, diantaranya mencakup:

- a. Memastikan fasilitas kantor dalam kondisi sangat baik
- b. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman mengenai budaya K3
- c. Meningkatkan peran dan fungsi semua sektor dalam pelaksanaan K3.

**3.****Profil Bank**

Informasi Umum Perusahaan	
Nama Perusahaan	PT BPR Sungkunandhana
Alamat	Jl. K.H. Mansyur No. 20 Kauman Juwana - Pati
Nomor Telepon	081393851215
Email	sungkunan@yahoo.co.id
Website	sungkunandhana.com

Skala Usaha Bank**Total Aset dan Kewajiban**

Jumlah aset di tahun 2024 sebesar Rp 41.367.482 mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir. Demikian juga kewajiban mengalami peningkatan dari tahun -tahun sebelumnya menjadi Rp 29.724.000.

(Ribuan Rp)			
Deskripsi	2024	2023	2022
Aset	41,367,482	39,780,942	40,454,803
Kewajiban	29,724,000	28,818,982	28,730,045

Jumlah pegawai

Sepanjang tahun 2024 Bank memiliki SDM total 74 personal yang terdiri dari Pengurus dan Pegawai dengan besaran gaji minimal sesuai upah minimum Pemerintah Kota. Demografi secara rinci menjadi lampiran dalam Laporan keberlanjutan ini.

Persentasi Kepemilikan Saham



LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2024

PT. BPR Sungkunandhana

Website: www.sungkunandhana.com, Email: sungkunan@yahoo.co.id

No	Nama	Jumlah Lembar Saham	Nominal	Proporsi
1	Ny. Luseria Siagian	2,342	4,684,000,000	78.07%
2	DR. Sihar P.H Sitorus	174	348,000,000	5.80%
3	Ny. Ika Rohani T. Sitorus	167	334,000,000	5.57%
4	Ny. Adumahati R.M Sitorus	163	326,000,000	5.43%
5	Sabar Ganda Leonardo Sitorus	77	154,000,000	2.57%
6	Hakim A.S Sitorus	77	154,000,000	2.57%



**Produk dan Layanan**

Produk

Jenis Produk	Deskripsi
Tabungan	1. Tabungan Pelajar
	2. Tabungan Umum
Deposito	1. Deposito Berjangka
Kredit	1. Kredit Pertanian
	2. Kredit Perdagangan
	3. Kredit Industri
	4. Kredit Peternakan
	5. Kredit Jasa
	6. Kredit Konsumsi

Profil Singkat dan Nilai Keberlanjutan Bank**a. Visi Keberlanjutan**

Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

b. Misi Keberlanjutan

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat
2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup

c. Keanggotaan Pada Asosiasi Regional hingga Nasional

Menjadi anggota Perbarindo (Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat)

Penjelasan Lainnya

BPR Sungkunandhana mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



4.

Penjelasan Direksi



Penjelasan Direksi

Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Bank berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai keberlanjutan dengan menjadi Bank yang terpercaya dan unggul dalam memberikan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Nilai keberlanjutan tersebut diimplementasikan melalui strategi utama dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko, serta peningkatan pertumbuhan portofolio kredit atau pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan, khususnya sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sektor UMKM merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, dan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia khususnya menyerap tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.



Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), BPR menetapkan RAKB dengan rencana 5 (lima) tahun sebagai



Rencana Aksi dalam Jangka Panjang. Selain itu, Bank juga memiliki Rencana Aksi dalam Jangka Pendek (satu tahun) yang ditetapkan di tahun 2024.

Target yang ditetapkan oleh Bank yaitu pegawai telah mengikuti sosialisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan menerapkan operasional perbankan hijau.

Laporan Keberlanjutan ini berisi komitmen, strategi dan kinerja pencapaian kami terkait Keuangan Berkelanjutan. Adapun komitmen kami adalah:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha terutama dalam pemberian kredit.
2. Menjalankan operasional Bank yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan kompetensi staf pada pemahaman terhadap sosial dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam setiap kegiatan usaha Bank.
4. Menerapkan perbankan yang inklusif dengan menyediakan dukungan akses keuangan bagi segenap masyarakat.
5. Berpartisipasi dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Strategi Pencapaian Target

Bank senantiasa meningkatkan strategi-strategi keberlanjutan khususnya dalam memitigasi risiko yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha Bank. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, BPR tidak terlepas dari berbagai risiko di antaranya risiko pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, risiko tersebut telah dikelola secara optimal oleh Bank dengan berbagai upaya mitigasi yang dilakukan.

Tantangan utama saat ini di awal peletakan pondasi batu pertama keuangan berkelanjutan adalah komunikasi dan membuat para pemangku kepentingan sadar akan pentingnya penerapan keuangan berkelanjutan dalam operasional dan bisnis perusahaan. Namun



demikian, kami sangat percaya bahwa ke depannya terdapat peluang penyaluran dana yang besar terkait dengan Keuangan Berkelanjutan.

Selama tahun 2024, BPR Sungkunandhana belajar untuk menjadi lebih baik dalam layanan keuangan berkelanjutan. Kami berharap adanya kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, regulator dan asosiasi untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BPR Sungkunandhana kedepannya akan terus menargetkan implementasi keuangan berkelanjutan, antara lain peningkatan pengetahuan semua jenjang organisasi mengenai keuangan berkelanjutan, menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada lingkungan dan sosial dalam operasional keseharian, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan portofolio produk keuangan berkelanjutan.

Dalam merealisasikan keuangan berkelanjutan, perlu adanya harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta permasalahan lingkungan lainnya yang menjadi tanggung jawab kita semua. Kami berpartisipasi memberikan kontribusi dalam mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional dan bisnis kami.



Apresiasi

BPR memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama-sama berkontribusi dalam penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan di BPR Sungkunandhana. Dukungan dan rasa percaya yang diberikan kepada kami, menjadi kekuatan kami untuk mampu memberikan dan menciptakan nilai keberlanjutan bagi semua pihak. Harapan kami adalah seluruh pemangku kepentingan dapat terus memberikan dukungan serta kerja samanya agar kami mampu tumbuh secara berkelanjutan dan kerjasama yang baik dalam mengelola isu-isu keberlanjutan.



5.

Tata Kelola Keberlanjutan

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Tata Kelola yang Baik (GCG - *Good Corporate Governance*) bagi Bank merupakan suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan 5 (lima) Pilar Tata Kelola, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Selain itu, GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika perbankan.

Struktur tata kelola perusahaan BPR Sungkunandhana sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi BPR Sungkunandhana No. SKDir.Godig/02/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Kebijakan Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik, adalah sebagai berikut:.

1. RUPS: adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/ atau Anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris; adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.

Dalam penerapan *good corporate governance*, Perseroan telah memiliki kerangka kerja (*frame work*) yang menggabungkan tiga hal yaitu Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*) dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Kerangka kerja dan operasional ini diharapkan mampu memberikan hasil berupa perwujudan ekspektasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan.

1. Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan

mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang merupakan salah satu kebijakan spesifik Bank.
2. Memberikan persetujuan terhadap RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)



3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

2. Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan mengusulkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada Dewan Komisaris.
3. Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) kepada Dewan Komisaris.
4. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
5. Memantau Pejabat Eksekutif satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan.

Sebagai BPR (Bank Perekonomian Rakyat) yang memiliki modal inti di bawah Rp 50 milyar, BPR Sungkunandhana berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Penerapan keuangan berkelanjutan di BPR Sungkunandhana secara umum menjadi tanggung jawab Direktur Utama sebagai pemimpin tertinggi di BPR Sungkunandhana. Namun, dalam pelaksanaannya, Direktur Utama telah menugaskan Direktur Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan yang membawahi Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai koordinator Tim Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang bertugas melakukan penyusunan, monitoring, dan penyampaian atas penerapan keuangan berkelanjutan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan penyampaian hasil pelaksanaan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam bentuk Laporan Berkelanjutan dilakukan oleh Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Koordinator Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan.

Adapun tugas dan tanggung jawab **Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan** adalah sebagai berikut:

Ketua (Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan):

1. Memastikan bahwa Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan Unit Kerja Pengelola telah melaksanakan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



2. Bersama- sama dengan Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan merekomendasikan hasil penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan hasil pemantauan Keuangan Berkelanjutan kepada Direksi sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris.

Koordinator (Bagian Kepatuhan dan Manajemen Kepatuhan):

1. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan seluruh anggota Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan serta Unit Kerja terkait hal- hal sebagai berikut: (a) Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); (b) Pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan (c) Penyusunan Laporan Berkelanjutan;
2. Menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tugas dan tanggung jawab tersebut pada butir (i) di atas kepada Ketua Tim, Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
3. Menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Berkelanjutan sebelum batas akhir penyampaian sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Pembekalan dilakukan melalui pemberian pelatihan yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2024 dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim. Materi yang disampaikan mencakup prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan kategori kegiatan yang tergolong sebagai KUB. Dengan demikian, Bank berharap dapat mengembangkan portofolio produk yang termasuk dalam kategori KUB di masa mendatang.

1. Sosialisasi Keuangan Berkelanjutan Tahap 1 sesuai POJK No. 51 yang dilakukan oleh Bagian Kepatuhan kepada SDM pada tanggal 02 Februari 2024 yang diikuti oleh 35 orang.
2. Sosialisasi program kerja implementasi keuangan berkelanjutan kepada seluruh SDM pada tanggal 5 Maret 2024 yang diikuti 32 orang.



Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Bank berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait aspek lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko Bank, melalui penyusunan kebijakan perkreditan maupun prosedur terkait portofolio produk yang termasuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Kebijakan dan prosedur tersebut telah menjadi bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan Bank yang ditargetkan dapat tersedia pada tahun 2024.

Untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, Bank akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Bank mengidentifikasi pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan pengaruh dan dampaknya terkait keuangan berkelanjutan.

Peluang dan Tantangan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Kesadaran mengenai prinsip keuangan berkelanjutan telah menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi dalam implementasi dan praktiknya selama tahun 2024 sehingga diperlukan ditingkatkan konsistensi pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, Bank mengidentifikasi adanya peluang dalam pembiayaan berkelanjutan terutama



untuk melayani segmen ritel dan UMKM untuk mendorong akselerasi usaha berwawasan lingkungan di masyarakat.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama penerapan keuangan berkelanjutan di BPR Sungkunandhana. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran karyawan. BPR Sungkunandhana di tahun 2024 pertama sekali menerapkan keuangan berkelanjutan masih fokus pada pengembangan pengetahuan dan kesadaran penerapan keuangan berkelanjutan kepada seluruh pegawai.
2. Penerapan keuangan berkelanjutan juga membutuhkan kerja sama dan dukungan penuh dari Pemerintah setempat, pelaku bisnis dan masyarakat
3. Kesadaran nasabah dan pemangku kepentingan juga diperlukan untuk mendukung dan menerapkan keuangan berkelanjutan. Pengembangan organisasi, produk dan kebijakan internal yang perlu disusun dan dikembangkan memerlukan waktu dan pengetahuan yang cukup terkait Keuangan Berkelanjutan.



6.

Kinerja Keberlanjutan

1. Kinerja Ekonomi

Tabel 6.1.1. Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi

Nominal uang dalam jutaan rupiah

Keterangan	2024	2023	2022
Kinerja Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah)			
Total Aset	41.367.482.423,09	39.780.942.037,86	40.454.803.144
Aset Produktif	41.931.557.824,09	40.430.176.597	41.222.219.692
Kredit/Pembiayaan Bank	34.545.940.858	31.184.653.000	31.802.205.000
Dana Pihak Ketiga	29.062.921.013	27.888.645.788	28.118.357.122
Pendapatan Operasional	14.460.642.426	13.638.368.556	14.575.666.460
Beban Operasional	9.501.707.804	9.530.260.514	9.534.355.314
Laba Bersih	4.057.163.760	3.375.641.926,86	4.138.439.949
Rasio Kinerja (Dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM)%	35,48%	49,26%	49,42%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif%	0%	0%	0%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif%	7,66%	7,66%	5,14%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif%	0%	0%	0%
NPL gross%	9,84%	10,48%	7,25%
NPL nett%	5,67%	6,34%	3,74%
Return on Asset (ROA)%	12,41%	10,39%	12,49%
Return on Equity (ROE)%	40,49%	34,82%	41,78%
Net Interest Margin (NIM)%	22,82%	20,97%	24,66%
Rasio Efisiensi (BOPO)%	63,81%	67,69%	61,67%
Loan to Deposit Ratio (LDR)%	118,87%	111,82%	84,19%



Terdapat peningkatan aset dan Laba BPR Sungkunandhana di sepanjang tahun 2024 jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 6.1.2. Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Nominal uang dalam jutaan rupiah

Keterangan	2024	2023	2022
Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan			
Penghimpunan Dana (Rp)	29.062.921.013	27.888.645.788	28.118.357.122
Penyaluran Dana (Rp)	34.545.940.858	31.184.653.000	31.802.205.000
Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	41.931.557.824,09	40.430.176.597	41.222.219.692
Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	34.545.940.858	31.184.653.000	31.802.205.000
Total Non-Kredit/Pembiayaan Non-Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	0	0	0
Persentase total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan (%)	0	0	0

Penghimpunan dana mengalami kenaikan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 dan 2022. Sementara itu



2. Kinerja Sosial

Komitmen Perusahaan

BPR Sungkunandhana memberikan layanan merata kepada seluruh nasabah tanpa memandang kelas pendapatan masyarakat.

Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

BPR memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai dengan memberikan pengupahan/ penggajian sesuai dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Kinerja Sosial Terhadap Masyarakat

BPR Sungkunandhana ikut berkontribusi memberikan sebagian dari laba yang disisihkan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)



3. Kinerja Lingkungan Hidup

Kegiatan Internal dan Kegiatan TJSL



BPR Sungkunandhana mewujudkan operasional bank ramah lingkungan dengan menerapkan berbagai kebijakan sesuai prinsip 3R (**Reduce, Reuse, Recycle**). Sosialisasi atas prinsip-prinsip ini terus dilakukan agar tujuan awal yang ditetapkan Perusahaan tercapai. Operasional kantor yang ramah lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan bahan baku/material, energi, dan air agar semua bisa lebih efisien. Dengan upaya itu, maka selama tahun pelaporan, operasional BPR Sungkunandhana tidak membawa dampak buruk bagi keanekaragaman hayati di lingkungan BPR.

Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

Perusahaan juga menerapkan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan termasuk mengganti penggunaan gelas plastik dengan *tumbler* yang disiapkan pegawai masing-masing.

Tabel 6.3.1. Uraian Penggunaan Energi

Keterangan	Penggunaan Pada Tahun Laporan
Listrik (kWh)	13.900
Volume Air dari PDAM (meter kubik)	2.792
Volume Air dari Sumur (meter kubik)	0
BBM (Liter)	2.400



4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebagai entitas bisnis, BPR Sungkunandhana senantiasa berupaya agar eksistensinya semakin maju dan berkembang. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi dan pengembangan produk dan layanan dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini yang sangat pesat sebagai faktor pendorong pergeseran perilaku masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, rasa aman dan kenyamanan dalam bertransaksi perbankan.

Dalam melakukan inovasi, BPR Sungkunandhana melakukannya dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kebijakan perusahaan. Adapun inovasi dan pengembangan produk/jasa yang dilakukan BPR Sungkunandhana selama tahun 2024 antara lain meluncurkan Program Kredit BPR Sungkunandhana, dan Tabungan Go Digital.

Selain itu, Perusahaan juga mengembangkan program kredit Scoring, program Pembuatan Aplikasi Monitoring Kredit, dan Pengembangan Web Based Laporan Tahunan bekerja sama dengan Vendor.

Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan

Semua produk dan jasa yang ditawarkan BPR Sungkunandhana telah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah teruji keamanannya bagi nasabah. Selaras dengan itu, untuk menekan risiko kerugian seminimal mungkin atas produk dan jasa tersebut, Perseroan secara kontinu menyampaikan informasi atas semua risiko yang mungkin terjadi kepada nasabah, seperti risiko pasar dan risiko fluktuasi mata uang. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran, formulir Ringkasan Informasi Produk dan layanan (RIPLAY) maupun secara tatap muka.

Sejalan dengan itu, sesuai regulasi yang ada, BPR Sungkunandhana juga melakukan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara berkala sehingga calon nasabah atau nasabah mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk/ jasa yang ditawarkan Perseroan. Dengan demikian, mereka akan melakukan investasi sesuai kebutuhan dan telah mengetahui profil risiko yang melekat di dalam produk/jasa tersebut.



Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR Sungkunandhana telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka BPR Sungkunandhana akan memberikan dana dengan memegang prinsip kehati-hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya itu membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan BPR Sungkunandhana pada tahun pelaporan.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal BPR Sungkunandhana maupun perintah dari regulator (OJK).

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR Sungkunandhana belum melakukan survey terhadap kepuasan pelanggan terhadap produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan, namun di sepanjang tahun 2024 tidak ada komplain dari nasabah atau masyarakat terhadap produk dan jasa Bank yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.



Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen

Atas pertimbangan tertentu mengingat ukuran dan kompleksitas usaha BPR Sungkunandhana yang masih terbatas maka Bank belum melakukan verifikasi tertulis dari pihak ketiga yang independen dikarenakan hal tersebut bukan merupakan persyaratan dari OJK. Namun demikian Bank menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan di dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual dan telah diverifikasi oleh pihak internal BPR.

Umpan Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah sekaligus penerapan evaluasi BPR Sungkunandhana yang bertujuan meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang, BPR Sungkunandhana menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir Laporan Keberlanjutan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

BPR Sungkunandhana memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, dan investor serta siapa saja yang memberikan umpan balik (*feedback*) mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi:

Bapak Sony Hendrasyahputra,S.Kom
Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko
PT BPR BPR Sungkunandhana
Jl. K.H. Mansyur No. 20 Kauman Juwana
Telepone : (0295) 471167
E-mail : sungkunan@yahoo.co.id



LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2024

PT. BPR Sungkunandhana

Website: www.sungkunandhana.com, Email: sungkunan@yahoo.co.id

Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 ini merupakan yang pertama kali oleh karenanya belum mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Bank akan terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi segenap pembaca.



PT. BPR Sungkunandhana
Jl. K.H Mansyur No. 20 Juwana Pati
Telepon: 0295-471167

Website: www.sungkunandhana.com, Email: sungkunan@yahoo.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2024
PT. BPR SUNKUNANDHANA**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2024 telah disusun sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pati, 30 April 2025

PT. BPR Sungkunandhana


Saradi, SE
Direktur Utama




Maruhum T.H. Malau, SE
Komisaris Utama



LAPORAN DEMOGRAFI PEGAWAI PT BPR SUNKUNANDANA TAHUN 2024

1. Demografi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

No	Level Organisasi	Demografi	
		Jumlah	Komposisi
1	Direksi	2	2.78%
2	Pejabat Eksekutif	7	6.94%
3	Pelaksana	64	90.28%
	Jumlah	72	100%

2. Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Tingkat Pendidikan	Demografi	
		Jumlah	Komposisi
1	S1	23	31.94%
2	Sarjana	3	2.78%
3	Lainnya / Tidak Diketahui	47	65.28%
	Jumlah	72	100%

3. Demografi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Demografi	
		Jumlah	Komposisi
1	Tetap	48	66.67%
2	Kontrak	24	33.33%
	Jumlah	72	100%



4. Demografi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

No	Rentang Usia	Demografi	
		Jumlah	Komposisi
1	Di Atas 55 Tahun	2	2.78%
2	45 s/d 55 Tahun	10	13.89%
3	35 s/d 45 Tahun	5	6.94%
4	25 s/d 35 Tahun	42	58.3%
5	20 s/d 25 Tahun	13	18.06%
	Jumlah	72	100%

5. Demografi Pegawai Berdasarkan Generasi

No	Generasi	Demografi	
		Jumlah	Komposisi
1	Baby Boomers 1946 - 1965	7	9.72%
2	Generation X 1965 - 1980	9	12.50%
3	Generation Y (millennials) 1981 - 1996	45	65.50%
4	Generation Z 1997 - 2012	11	15.28%
	Jumlah	72	100%



PT. K.H. Mansyur No. 20 Juwana Pati

Telepon: 0295-471167

Website: www.sungkumandhana.com Email: sungkuman@yahoo.co.id

Laporan Realisasi Program Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024

No	Deskripsi Program Kerja	Rencana Pelaksanaan	Realisasi
1	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan Tujuan: Peningkatan awareness (penyadartahuan) tentang Keuangan Berkelanjutan. Indikator Ketercapaian: Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai. Sumber Daya yang Dibutuhkan: Dana dan sumber daya manusia Penanggung Jawab: Bagian SDM dan Kepatuhan	01 Jan 2024 s/d 31 Jan 2024	Belum terealisasi
2	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup Tujuan: Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan Indikator Ketercapaian: Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar. Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Kepatuhan	01 Mar 2024 s/d 31 Mar 2024	Belum terealisasi



3	Efisiensi Penggunaan Listrik Tujuan: Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi Indikator Ketercapaian: Penghematan biaya listrik sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2023. Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Bagian Umum	01 Apr 2024 s/d 30 Apr 2024	Telah diberlakukan
4	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan Tujuan: Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan Indikator Ketercapaian: Ditunjukknya Unit Kerja yang mengelola dan/ atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Direksi	01 Mei 2024 s/d 31 Mei 2024	Belum terealisasi
5	Penyusunan SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan Tujuan: Memiliki SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan Indikator Ketercapaian: SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Bagian Kepatuhan	01 Jul 2024 s/d 31 Jul 2024	Belum terealisasi



6	Mengurangi Penggunaan Kertas Tujuan: Penghematan dan mendukung program go green Indikator Ketercapaian: Penghematan penggunaan kertas sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2023. Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Bagian Umum dan Kepatuhan	01 Agut 2024 s/d 31 Agut 2024	Pemberlakuan telah dilakukan.
7	Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan Tujuan: Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai. Indikator Ketercapaian: Penurunan penggunaan air minum kemasan Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Bagian Kepatuhan	01 Nov 2024 s/d 30 Nov 2024	Pemberlakuan telah dilakukan.



PT. BPR Sungkunandhana
Jl. K.H Mansyur No. 20 Juwana Pati
Telepon: 0295-471167
Website: www.sungkunandhana.com, Email: sungkunan@yahoo.co.id

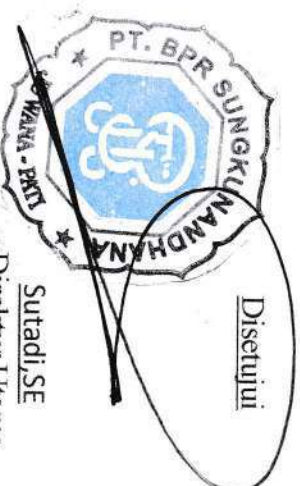
Pati, 30 April 2025

PT. BPR Sungkunandhana

Disiapkan

Sony Hendrasyahputra
PE Kepatuhan

Disetujui



Sutadi, SE
Direktur Utama



Terima kasih atas kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk membaca Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) PT. BPR Sungkunandhana ini. Guna meningkatkan kualitas dan kelengkapan Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang kami berharap kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk mengisi Lembar Umpan Balik yang telah disiapkan di bawah ini, dan mengirimkannya kembali kepada kami.

1. Laporan Keberlanjutan ini telah menyediakan informasi mengenai berbagai hal yang telah dilaksanakan PT. BPR Sungkunandhana dalam pemenuhan kewajiban terhadap pengaturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Bank.

☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu

2. Materi Laporan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai aspek kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan hidup pada PT. BPR Sungkunandhana.

☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu

3. Materi dalam Laporan Keberlanjutan ini, termasuk data dan informasi yang disajikan sudah cukup lengkap.

☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu

4. Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang.

☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu

5. Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan.

☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu

6. Laporan Keberlanjutan ini menarik dan mudah dibaca.

☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu

7. Informasi apa saja yang dirasakan kurang dan harus dilengkapi dalam Laporan Keberlanjutan di masa mendatang?

.....
.....

8. Mohon berikan saran dan komentar terhadap Laporan Keberlanjutan ini.

.....
.....



Profil Anda

Nama :
Pekerjaan :
Institusi/Perusahaan :
Kontak (telepon, *e-mail*) :

Kategori Pemangku Kepentingan

☐ Pemerintah ☐ Nasabah ☐ Karyawan ☐ Mitra Usaha
☐ Media ☐ Masyarakat ☐ LSM ☐ Lain-Lain

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam laporan ini mohon dikirim ke:

PT. BPR Sungkunandhana
Jl. K.H Mansyur No. 20 Juwana Pati
Telepon : 0295-471167
Website : www.sungkunandhana.com
E-mail : sungkunan@yahoo.co.id



PT. BPR Sungkunandhana
Jl. K.H Mansyur No. 20 Juwana Pati
Telepon: 0295-471167

Website: www.sungkunandhana.com, Email: sungkunan@yahoo.co.id

Nomor : 29 /BPR-SD/IV/2025
Tanggal : 30 April 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada
Kantor Regional 3
Otoritas Jasa Keuangan
Jl. Kyai Saleh No. 12-14
Jawa Tengah

Perihal : Penyampaian Laporan Tahunan PT BPR SUNKUNANDANA Tahun 2024

Referensi:

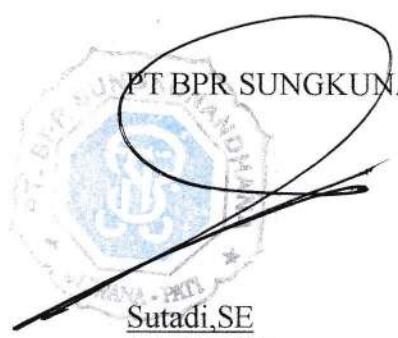
1. POJK No. 23 Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan (TKK) Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. SEOJK No. 16/SEOJK.03/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan (TKK) Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Menunjuk perihal dan referensi di atas, dengan ini kami sampaikan Laporan Tahunan PT BPR SUNKUNANDANA Tahun 2024 yang terdiri atas:

1. Laporan Tahunan
Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPRS, antara lain Laporan Keuangan Tahunan dan Informasi Lainnya
2. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola
Data dan/ atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS, antara lain ringkasan hasil penilaian sendiri atas tata kelola BPR, kepemilikan saham, hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

PT BPR SUNKUNANDANA


Sutadi, SE
Direktur Utama



PT. BPR Sungkunandhana
Jl. K.H. Mansyur No. 20 Juwana Pati
Telepon: 0295-471167

Website: www.sungkunandhana.com, Email: sungkunan@yahoo.co.id

Lembar Pernyataan
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang
Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun 2024
PT BPR SUNKUNANDHANA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT BPR SUNKUNANDHANA tahun 2024 telah ditinjau dan dibuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PATI, 30 April 2025
PT BPR SUNKUNANDHANA

Disusun

Sutadi, SE
Direktur Utama

Ayudi, SE
Direktur

Ditutupi

Maruhum T.H. Malau, SE
Komisaris Utama

Suhari, SE
Komisaris



LAPORAN HASIL PENGUJIAN ATAS
POS-POS LAPORAN KEUANGAN PT
BPR SUNKUNANDHANA
Posisi 31 Desember 2024

Nama BPR : PT BPR SUNKUNANDANA
Alamat : JL..K.H. Mansyur No. 20 Kauman Juwana - Pati
Nomor Telepon : (0 2 9 5) 4 7 1 1 6 7
Keuangan : 31 Desember 2024
Modal Inti : Rp. 9.614.899.782
Total Aset : Rp. 41.367.482.423

1. Pengujian Atas Pos-pos Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

1.1. Pengujian Atas Pos-pos Aset pada Laporan Posisi Keuangan

Tabel 1. Aset pada Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	DESEMBER 2023	DESEMBER 2024	EVALUASI	%
1. Kas	178,674,600	67,043,000	(111,631,600)	-62.48%
3. Pendapatan bunga yang akan diterima	439,531,024	472,903,620	33,372,596	7.59%
4. Penempatan pada bank lain	9,245,523,597	7,385,616,966	(1,859,906,631)	-20.12%
-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	(28,898,233)	(19,601,479)	9,296,754	-32.17%
5. Kredit yang diberikan	31,184,653,000	34,545,940,858	3,361,287,858	10.78%
-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	(1,420,785,000)	(1,600,098,687)	(179,313,687)	12.62%
-/-Pend Provisi yang belum diamortisasi	(436,995,936)	(473,772,964)	(36,777,028)	8.42%
6. Aset tetap dan inventaris	2,175,049,475	2,329,202,471	154,152,996	7.09%
-/- Akum. pnysutan dan penurunan nilai	(1,985,711,552)	(1,997,035,203)	(11,323,651)	0.57%
7. Aset tidak berwujud			-	
-/- Akum. pnysutan dan penurunan nilai			-	
8.Aset lain-lain	429,901,063	657,283,841	227,382,778	52.89%
TOTAL ASET	39,780,942,038	41,367,482,423	1,586,540,385	3.99%



1. Kas dalam Rupiah

Kas dalam Rupiah di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.67.043.000, turun sebesar Rp.111.631.600 atau -62.48%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.178.674.600 pada 31 Desember 2023.

2. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada Bank Lain di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.7.385.616.966, turun sebesar Rp.1.859.906.631 atau -20.12%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.9.245.523.597 pada 31 Desember 2023.

3. -/- CKPN/PPKA Penempatan pada Bank Lain

-/- CKPN/PPKA Penempatan pada Bank Lain di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.19.601.479, turun sebesar Rp.9.296.754 atau -32.17,00%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar -Rp.28.898.233 pada 31 Desember 2023.

4. Kredit yang Diberikan (Baki Debet)

Kredit yang Diberikan (Baki Debet) di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.34.545.940.858, tumbuh sebesar Rp.3.361.287.858 atau 10.78%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.31.184.653.000 pada 31 Desember 2023.

5. -/- Provisi Belum Diamortisasi

-/- Provisi Belum Diamortisasi di PT. BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.473.772.964, turun sebesar Rp.36.777.028 atau -8.42%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.436.995.936 pada 31 Desember 2023.

6. -/- CKPN/PPKA Kredit yang Diberikan

-/- CKPN/PPKA Kredit yang Diberikan di PT. BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.600.098.687, tumbuh sebesar Rp.179.313.687 atau 12.62%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.420.785.000 pada 31 Desember 2023.

7. Aset Tetap dan Inventaris

Aset Tetap dan Inventaris di PT. BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.2.329.202.471, tumbuh sebesar Rp.154.152.996 atau 7.09%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.2.175.049.475 pada 31 Desember 2023.

8. -/- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

-/- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris di PT. BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.997.035.203, tumbuh sebesar Rp.11.323.651 atau 0.57%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.985.711.552 pada 31 Desember 2023.



9. Aset Lainnya

Aset Lainnya di PT. BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.657.283.841, tumbuh sebesar Rp227.382.778 atau 52.89%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.429.901.063 pada 31 Desember 2023.

10. TOTAL ASET

TOTAL ASET di PT. BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.41.367.482.423, tumbuh sebesar Rp.1.586.540.385 atau 3.99%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.39.780.942.038 pada 31 Desember 2023.

1.2. Pengujian Atas Pos-pos Liabilitas pada Laporan Posisi Keuangan

Tabel 2. Liabilitas pada Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	DESEMBER 2023	DESEMBER 2024	EVALUASI	%
1. Liabilitas Segera	562,789,595	517,080,061	(45,709,534)	-8.12%
2. Tabungan	6,827,695,788	6,273,971,013	(553,724,775)	-8.11%
3. Deposito	21,060,950,000	22,788,950,000	1,728,000,000	8.20%
4. Liabilitas Lainnya	367,546,826	143,999,687	(223,547,139)	-60.82%
Total Liabilitas	29,381,771,804	30,241,080,822	859,309,018	2.92%

1. Liabilitas Segera

Liabilitas Segera di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.517.080.061, turun sebesar Rp.45.709.534 atau -8,12%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.562.789.595 pada 31 Desember 2023.

2. Tabungan

Tabungan di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.6.273.971.013, tumbuh sebesar Rp.553.724.775 atau 8.11%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp6.827.695.788 pada 31 Desember 2023.

3. Deposito

Deposito di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.22.788.750.000, tumbuh sebesar Rp.1.728.000.000 atau 8.20%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.21.060.950.000 pada 31 Desember 2023.



4. Liabilitas Lainnya

Liabilitas Lainnya di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.143.999.687, turun sebesar Rp.223.547.139 atau -60.82%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.367.546.826 pada 31 Desember 2023.

5. TOTAL LIABILITAS

TOTAL LIABILITAS di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.30.241.080.822, tumbuh sebesar Rp.859.309.018 atau 2.92%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.29.381.771.804 pada 31 Desember 2023.

1.3. Pengujian Atas Pos-pos Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan

Tabel 3. Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	Des 2023 (Rp)	Des 2024 (Rp)	Evaluasi	%
Modal Dasar	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0,00%
Cadangan Umum	1.586.317.902	1.586.317.902	0	0,00%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.375.641.927	4.057.163.760	681.521.833	20,19%
TOTAL EKUITAS	10.961.959.829	11.643.481.662	681.521.833	6,22%

1. Modal Dasar

Modal Dasar di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.000.000.000, tumbuh sebesar Rp0 atau 0,00%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.6.000.000.000 pada 31 Desember 2023.

2. Cadangan Umum

Cadangan Umum di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.586.317.902, tumbuh sebesar Rp.0 atau 0,00%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.586.317.902 pada 31 Desember 2023.

3. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba (Rugi) Tahun Berjalan di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.4.057.163.760, tumbuh sebesar Rp.681.521.833 atau 20.19%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.3.375.641.927 pada 31 Desember 2023.

4. TOTAL EKUITAS

TOTAL EKUITAS di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.11.643.481.662, tumbuh sebesar Rp. 681.521.833 atau 6,22%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp. 10.961.959.829 pada 31 Desember 2023.



2. Pengujian Atas Pos-pos Laporan Laba Rugi

Tabel 4. Laporan Laba Rugi

Keterangan	Desember 2023	Desember 2024	EVALUASI	%
A. Pendapatan operasional	12,583,970,649	13,598,024,328	1,014,053,679	8.06%
1. Pendapatan Bunga kontraktual	130,132,102	134,876,520	4,744,418	3.65%
2. Pendapatan Bunga kontraktual Kredit	9,696,091,900	10,669,892,181	973,800,281	10.04%
3. Pendapatan Bunga provisi Kredit	1,383,172,243	1,519,342,972	136,170,729	9.84%
4. Pendapatan Lainnya	1,374,574,404	1,273,912,655	(100,661,749)	-7.32%
B. Beban operasional	8,518,635,675	8,676,603,456	157,967,781	1.85%
1. Beban Bunga Kontraktual	1,654,867,425	1,588,240,226	(66,627,199)	-4.03%
2. Beban penyisihan penghapusan aset produktif	877,708,007	771,777,432	(105,930,575)	-12.07%
3. Beban pemasaran	16,207,570	20,972,280	4,764,710	29.40%
4. Beban administrasi dan umum	5,946,871,681	6,276,728,330	329,856,649	5.55%
5. Beban lainnya	22,980,992	18,885,188	(4,095,804)	-17.82%
C. 1. Laba/Rugi operasional (A-B)	4,065,334,974	4,921,420,872	856,085,898	21.06%
D. Pendapatan Non Operasional	1,054,397,907	862,618,098	(191,779,809)	-18.19%
E. Beban non-operasional	1,011,624,839	825,104,348	(186,520,491)	-18.44%
F. Laba/Rugi non-operasional (D-E)	42,773,068	37,513,750	(5,259,318)	-12.30%
G. Laba/Rugi tahun berjalan	4,108,108,042	4,958,934,622	850,826,580	20.71%
Taksiran pajak penghasilan	732,466,115	901,770,862	169,304,747	23.11%
I. Jumlah laba bersih	3,375,641,927	4,057,163,760	681,521,833	20.19%

1. Pendapatan Bunga Kontraktual Penempatan Pada Bank Lain

Pendapatan Bunga Kontraktual Penempatan Pada Bank Lain di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.134.876.520, tumbuh sebesar Rp.4.744.418 atau 3.65%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.130.132.102 pada 31 Desember 2023.

2. Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit yang Diberikan

Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit yang Diberikan di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.10.669.892.181, tumbuh sebesar Rp.973.800.281 atau 10.04%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.9.696.091.900 pada 31 Desember 2023.

3. Pendapatan Provisi Kredit

Pendapatan Provisi Kredit di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.519.342.972, tumbuh sebesar Rp.136.170.729 atau 9.84%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.383.172.243 pada 31 Desember 2023.

4. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.273.912.655, turun sebesar Rp.100.661.749 atau -7.32%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.374.457.404 pada 31 Desember 2023.



5. Total Pendapatan Operasional

Total Pendapatan Operasional di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.13.598.024.328 tumbuh sebesar Rp.1.014.053.679 atau 8.06%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.12.583.970.649 pada 31 Desember 2023.

6. Beban Bunga Kontraktual

Beban Bunga Kontraktual di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.588.240.226, turun sebesar Rp.66.627.199 atau -4.03%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.654.867.425 pada 31 Desember 2023.

7. Beban Kerugian Penurunan Nilai

Beban Kerugian Penurunan Nilai di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.771.777.432, turun sebesar Rp.105.930.575 atau -12.07%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.877.708.007 pada 31 Desember 2023.

8. Beban Pemasaran

Beban Pemasaran di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.20.972.280, tumbuh sebesar Rp.4.764.710 atau 29.40%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.16.207.570 pada 31 Desember 2023.

9. Beban Administrasi dan Umum

Beban Administrasi dan Umum di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.6.276.728.330, tumbuh sebesar Rp.329.856.649 atau 5.55%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.5.946.871.681 pada 31 Desember 2023.

10. Beban Lainnya

Beban Lainnya di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.18.885.188, turun sebesar Rp.4.095.804 atau 17.82%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.22.980.992 pada 31 Desember 2023.

11. Total Beban Operasional

Total Beban Operasional di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.8.676603.456, tumbuh sebesar Rp.157.967.781 atau 1.85%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.8.518.635.675 pada 31 Desember 2023.

12. Laba (Rugi) Operasional

Laba (Rugi) Operasional di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.4.921.420.872, tumbuh sebesar Rp.856.085.898 atau 21.06%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.4.065.334.974 pada 31 Desember 2023.



13. Total Pendapatan Non Operasional

Total Pendapatan Non Operasional di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.862.618.098, turun sebesar Rp.191.779.809 atau -18.19%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.054.397.907 pada 31 Desember 2023.

14. Total Beban Non Operasional

Total Beban Non Operasional di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.825.104.348, turun sebesar Rp.186.520.491 atau -18.44%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.011.624.839 pada 31 Desember 2023.

15. Laba (Rugi) Non Operasional

Laba (Rugi) Non Operasional di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.37.513.750, turun sebesar Rp.5.259.318 atau 12.30%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.42.773.068 pada 31 Desember 2023.

16. Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.4.958.934.622, tumbuh sebesar Rp.850.826.580 atau 20.71%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.4.108.108.042 pada 31 Desember 2023.

17. Taksiran Pajak Penghasilan

Taksiran Pajak Penghasilan di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.901.770.862, tumbuh sebesar Rp.169.304.747 atau 23.11%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.732.466.115 pada 31 Desember 2023.

18. Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Setelah Pajak)

Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Setelah Pajak) di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.4.057.163.760, tumbuh sebesar Rp.681.521.833 atau 20.19%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp.3.375.641.927 pada 31 Desember 2023.



3. Pengujian Atas Pos-pos Data Fluktuasi Rasio-rasio Keuangan

Tabel 5. Data Fluktuasi Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	Des 2023 (%)	Des 2024 (%)	Evaluasi	%
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	49.26	35.48	-13.78	-27.97%
Rasio Cadangan Terhadap PPKA	100.00	100.00	0	0.00%
Non Performing Loan (NPL) Neto	6.34	5.67	-0.67	-10.57%
Non Performing Loan (NPL) Gross	10.48	9.84	-0.64	-6.11%
Return on Assets (ROA)	10.39	12.41	2.02	19.44%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	67.69	63.81	-3.88	-5.73%
Net Interest Margin (NIM)	20.97	22.82	1.85	8.82%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	111.82	118.87	7.05	6.30%
Cash Ratio (CR)	14.45	12.32	-2.13	-14.74%

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar 35.48%, turun sebesar 13.78% , dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 49.25% pada 31 Desember 2023.

2. Rasio Cadangan Terhadap PPKA

Rasio Cadangan Terhadap PPKA di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar 100.000%, tumbuh sebesar 0.00% , dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 100.00% pada 31 Desember 2023.

3. Non Performing Loan (NPL) Neto

Non Performing Loan (NPL) Neto di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar 5.67%, turun sebesar -0.67% , dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 6.34% pada 31 Desember 2023.



4. Non Performing Loan (NPL) Gross

Non Performing Loan (NPL) Gross di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar 9.84%, turun sebesar 0.64%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 10.48% pada 31 Desember 2023.

5. Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar 12.41%, tumbuh sebesar 2.02%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 10.39% pada 31 Desember 2023.

6. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar 63.81%, turun sebesar -3.88%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 67.69% pada 31 Desember 2023.

7. Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar 22.82%, tumbuh sebesar 1.85%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 20.97% pada 31 Desember 2023.

8. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar 118.87%, tumbuh sebesar 7.05%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 111.82% pada 31 Desember 2023.

9. Cash Ratio (CR)

Cash Ratio (CR) di PT BPR Sungkunandhana posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar 12.32%, turun sebesar -2.13%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 14.45% pada 31 Desember 2023.



Analisa dan Kesimpulan Akhir Hasil Pengujian Atas Pos-pos Laporan Keuangan

PT. BPR Sungkunandhana mengalami tekanan pada kinerja keuangannya di periode ini, yang tercermin dari beberapa indikator utama. Rasio Non- Performing Loan (NPL) mencatatkan peningkatan seiring dengan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit terkait pandemi COVID-19. Kondisi ini mengindikasikan adanya sejumlah debitur yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka pasca berakhirnya relaksasi kebijakan tersebut. Sebagai dampak dari meningkatnya NPL, bank perlu mengalokasikan dana lebih besar untuk Penyisihan Penghapusan Kredit Aktiva (PPKA) guna mengantisipasi potensi kerugian kredit. Peningkatan beban pencadangan ini berkontribusi pada tekanan terhadap profitabilitas bank.

Di sisi pendapatan, bank mengalami penurunan pada pendapatan bunga yang turut mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut - kenaikan NPL, peningkatan beban PPKA, dan penurunan pendapatan bunga - mengakibatkan penurunan signifikan pada laba bank. Meski demikian, penurunan ini masih dapat dikategorikan wajar mengingat kondisi dan tantangan yang dihadapi.

Secara umum pengujian atas pos- pos laporan keuangan menunjukkan kondisi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.



LAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK MENINGKATKAN INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN BANK

Posisi Keuangan : 31 Desember 2024
Nama BPR : PT BPR SUNKUNANDHANA
Alamat : JL.K.H. MANSYUR NO.20 KAUMAN JUWANA
Nomor Telepon : (0295) 471167
Modal Inti : Rp. 9.614.899.782
Total Aset : Rp. 41.367.482.423

PT BPR Sungkunandhana melaksanakan sistem pengendalian internal dalam proses Pelaporan Keuangan Bank untuk meningkatkan integritas pelaporan keuangan Bank sebagaimana yang diamanatkan dalam POJK No. 15 Tahun 2024. Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan BPR Sungkunandhana bertujuan untuk : (1) memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; (2). Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan; (3). Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan (4) .Memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan (PIPKu) dilaksanakan agar Informasi Keuangan dan/ Laporan Keuangan semakin berintegritas. Terselenggaranya sistem pengendalian internal Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab Direksi. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di s etiap jenjang organisasi serta melaksanakan penilaian terhadap pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank sesuai dengan pasal 8 ayat (3) POJK N0. 15 Tahun 2024.

Dasar Penetapan

Bank mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang ditetapkan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. POJK No. 15 Tahun 2024 tanggal 09 Oktober 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
2. POJK No. 9 Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank
Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. SEOJK No. 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank
Perekonomian Rakyat

I. Pendahuluan

BPR Sungkunandhana melaksanakan penilaian sendiri terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank menggunakan Kerangka Kerja COSO dengan 5 (lima) Komponen



Pengendalian Internal sesuai informasi sebagai berikut:

1. Metodologi

COSO framework adalah kerangka kerja yang dapat membantu perusahaan menghubungkan pengendalian internal dengan proses bisnis mereka. Caranya yaitu dengan menanamkan pengendalian internal pada aktivitas sehari-hari. Jika digunakan secara efektif, COSO mampu menjamin pemenuhan standar etika dan keamanan bagi para pemegang saham serta Dewan Direksi perusahaan

2. Kerangka

Penilaian sendiri terhadap 5 (lima) komponen pengendalian COSO yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Aktivitas Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi; dan (5) Pemantauan.

2.1. Lingkungan Pengendalian (**Control Environment**)

Dalam lingkungan pengendalian, perusahaan perlu memverifikasi proses bisnis yang memenuhi standar risiko dengan pengujian. Dengan begitu, Anda dapat memastikan semua aktivitas dilakukan secara bertanggung jawab.

2.2. Penilaian Risiko

Perusahaan dapat meminimalkan kemungkinan kerugian dengan menilai risiko yang saat ini dihadapi. Serta menyusun rencana untuk mengelola dan memitigasi risiko tersebut. Proses ini haruslah berkelanjutan atau otomatis, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi risiko yang baru muncul.

2.3. Aktivitas Pengendalian

Adanya aktivitas kontrol dapat memastikan jika semua aktivitas bisnis terkait dengan pengendalian internal. Pengendalian tersebut harus mendukung kinerja bisnis dan mengurangi paparan risiko perusahaan.

2.4. Informasi dan Komunikasi

Komunikasi internal dan eksternal memiliki berbagai standar hukum dan etika yang berlaku. Sedangkan kebijakan privasi dan pengendalian aplikasi lainnya dapat menjadi contoh bagaimana perusahaan dapat menerapkan pengendalian proses komunikasi.

2.5. Pemantauan

Monitoring atau pemantauan akan memastikan bahwa perubahan tidak akan membuat perusahaan terkena risiko. Auditor internal umumnya akan bertanggung jawab terkait hal ini.

II. Profil BPR

No	Informasi	Deskripsi / Keterangan
1	Dasar Hukum Pendirian BPR dan Ijin Operasional dari Regulator	PT BPR Sungkunandhana didirikan pada tanggal 27 Juli 1990 sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris J Woworuntu, SH Nomor 443 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 21 Oktober 1991 Nomor C2-5936 HT.01.01.TH 91 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 4 Februari 1992 Nomor 10 Tambahan Nomor 497.PT BPR Sungkunandhana



		mengalami perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 50 tertanggal 23 Februari 1998 dan Akta Notaris Nomor 51 tertanggal 19 Mei 1999, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 Februari 2000 dengan Nomor C-1390 HT.01.04.TH.2000. Perseroan mengalami perubahan kembali sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 43 tanggal 16 Mei 2001 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 27 Juni 2001 dengan Nomor C-02540 HT.01.04.TH.2001. Pada tanggal 17 Desember 2012, Perseroan mengalami perubahan kembali sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 16 dan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 18 April 2006. Pada tanggal 7 Februari 2007, Perseroan mengalami perubahan kembali sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 6 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 9 Maret 2007 dengan Nomor W7-HT.01.10-2805. Pada tanggal 7 Februari 2007, Perseroan mengalami perubahan kembali sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 6 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 9 Maret 2007 dengan Nomor W7-HT.01.10-2805. Perseroan mencatatkan kembali Akta Pernyataan Keputusan Rapat sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Yoko Verra Mokoagow, SH Nomor 46 tertanggal 21 Agustus 2008. Perseroan mencatatkan kembali Akta Pernyataan Keputusan Rapat sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Marlon Silitonga, S.H. Nomor 19 tertanggal 13 Juni 2017.
--	--	--



2	Pemegang Saham	1. Luceria Siagian (78.07%) - Pemegang Saham Pengendali (PSP) 2. Sabar Ganda L Sitorus (2.57%) - Non PSP 3. Sihar Ph Sitorus (5.80%) - Non PSP 4. Adumahati RM Sitorus (5.43%) - Non PSP 5. Hakim Agung S Sitorus (2.57%) - Non PSP 6. Ika Rohani Tiurlara Sitorus (5.57%) - Non PSP
3	Dewan Komisaris	1. Maruhum T.H Malau,SE (Komisaris Utama) 2. Suhari,SE (Komisaris)
4	Direksi	1. Sutadi,SE (Direktur Utama) 2. Ayudi,SE (Direktur Operasional dan YMF Kepatuhan)
5	Jumlah Pegawai	1. Kantor Pusat : 22 orang 2. Cabang : 50 orang
6	Jaringan Kantor	1. Kantor Pusat 2. 3 (Tiga) Kantor Cabang

III. Hasil Penilaian Sendiri *Self Assessment* Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan

No	Informasi	Deskripsi / Keterangan
1	Periode Self Assessment	01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
2	Total Nilai	74
3	Jumlah Indikator	37
4	Rata-rata Nilai	2
5	Peringkat Self Assessment	2
6	Predikat Self Assessment	Peringkat 2 (Cukup Memadai)

Analisa dan Penjelasan

Kualitas 5 (lima) Komponen COSO pengendalian internal yaitu (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi & Komunikasi; (5) Pemantauan, secara umum cukup memadai dan membutuhkan perbaikan cukup signifikan agar dapat memberikan kontribusi secara berkesinambungan terhadap peningkatan kualitas pengendalian internal pada level yang dapat diterima.



IV. Analisa dan Mitigasi Risiko

Mitigasi Risiko. perlu dibangun untuk mencegah terjadinya kesalahan bayar,

V. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Peringkat Pengendalian Internal BPR Sungkunandhana berada pada peringkat 2 (Cukup Memadai). Selanjutnya BPR Sungkunandhana hendak memperkuat pengendalian internal agar berada pada Peringkat

1 (Sangat Memadai) dengan melakukan perbaikan pada komponen 5 (lima) COSO dengan tindak lanjut:

1. Direksi dan Dewan Komisaris konsisten untuk meningkatkan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
2. Memastikan konsistensi pelaksanaan prosedur pencatatan transaksi keuangan sehingga Laporan Keuangan dapat dipersiapkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan;
3. Meningkatkan peran bagian Manajemen Risiko untuk membantu Direksi mengawasi penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank agar Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan merepresentasikan secara tepat kondisi Bank.

Penutup

Demikianlah Laporan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan BPR Sungkunandhana dibuat sebagai pemenuhan atas POJK 15 tahun 2024.



Lampiran 1. Self Assessment

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENGENDALIAN INTERNAL PELAPORAN KEUANGAN

Nama BPR : PT BPR SUNGKUNANDHANA
Alamat : JL.K.H MANSYUR NO.20 KAUMAN JUWANA
Nomor Telepon : (0295) 471167
Periode : 01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024
Modal Inti : Rp. 9.614.899.782
Total Aset : Rp. 41.367.482.423

Komponen 1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
A. Menunjukkan Komitmen terhadap Nilai Integritas dan Etika			
1	K1.LP.P01.01 Komitmen terhadap Integritas Manajemen BPR/ S menjadi role model (teladan) dengan menerapkan integritas dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan menerapkan prinsip- prinsip kehati-hatian Bank.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Implementasi indikator Manajemen BPR/ S menjadi role model (teladan) dengan menerapkan integritas dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan menerapkan prinsip- prinsip kehati- hatian Bank, di BPR menunjukkan kondisi nilai 2 (cukup memadai).
2	K1.LP.P01.02 Sosialisasi Meningkatkan Kepatuhan BPR/ S melaksanakan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban untuk patuh terhadap ketentuan dan tidak melakukan manipulasi, pencatatan palsu, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang digunakan sebagai dasar penyusunan Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Kondisi indikator BPR/ S melaksanakan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban untuk patuh terhadap ketentuan dan tidak melakukan manipulasi, pencatatan palsu, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang digunakan sebagai dasar penyusunan Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank", yang dimiliki BPR adalah nilai 2 (cukup memadai).



No	Indikator	Penilaian	Keterangan
3	K1.LP.P01.03 Penaan sanksi atas pelanggaran Direksi / Pimpinan Unit Kerja memberikan sanksi kepada Pegawai yang melanggar peraturan perusahaan dan kode etik dan/ atau aturan perilaku lainnya termasuk tindakan pelanggaran yang mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan, atau merusak pencatatan suatu transaksi atau informasi dalam pembukuan, dan dokumen Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan Bank.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Indikator Direksi / Pimpinan Unit Kerja memberikan sanksi kepada Pegawai yang melanggar peraturan perusahaan dan kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya termasuk tindakan pelanggaran yang mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan, atau merusak pencatatan suatu transaksi atau informasi dalam pembukuan, dan dokumen Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan Bank", pada BPR indikator Direksi / Pimpinan Unit Kerja memberikan sanksi kepada Pegawai yang melanggar peraturan perusahaan dan kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya termasuk tindakan pelanggaran yang mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan, atau merusak pencatatan suatu transaksi atau informasi dalam pembukuan, dan dokumen Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan Bank", dinilai nilai 2 (cukup memadai).
4	K1.LP.P01.04 Pemegang Saham yang Berintegritas Pemegang saham mendukung proses pelaporan keuangan Bank yang berkualitas dan andal serta tidak melakukan intervensi yang dapat menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank dan/atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pemegang saham mendukung proses pelaporan keuangan Bank yang berkualitas dan andal serta tidak melakukan intervensi yang dapat menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank dan/ atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank", yang dimiliki BPR dinilai nilai 2 (cukup memadai).
5	K1.LP.P01.05 Pihak Terafiliasi Pihak Terafiliasi mengetahui bahwa dilarang melakukan intervensi kepada Direksi, Dewan Komisaris BPR, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan/ atau Pejabat Eksekutif dalam proses pelaporan keuangan Bank. Dan Pihak Terafiliasi mematuhi dan tidak melakukan intervensi dimaksud.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Pihak Terafiliasi mengetahui bahwa dilarang melakukan intervensi kepada Direksi, Dewan Komisaris Bank Umum, Dewan Komisaris BPR, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan/ atau Pejabat Eksekutif dalam proses pelaporan keuangan Bank. Dan Pihak Terafiliasi mematuhi dan tidak melakukan intervensi dimaksud", berjalan dengan nilai 2 (cukup memadai).
B. Tanggung Jawab Pengawasan			



No	Indikator	Penilaian	Keterangan
6	K1.LP.P02.01 Pengawasan Direksi Direksi bertanggung jawab memastikan kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan ketentuan serta penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Indikator Direksi bertanggung jawab memastikan kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan ketentuan serta penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, pada BPR saat ini dinilai nilai 2 (cukup memadai).
7	K1.LP.P02.02 Pengawasan Dewan Komisaris Dewan Komisaris BPR/ S melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris BPR/ S melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank", yang nilai 2 (cukup memadai).
C. Menetapkan Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab			
8	K1.LP.P03.01 Menetapkan Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab BPR/ S memiliki dan menetapkan struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang tidak terbatas pada pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank di masing-masing individu pegawai.	Nilai 1 (Memadai)	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR/ S memiliki dan menetapkan struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang tidak terbatas pada pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank di masing-masing individu pegawai", berjalan dengan nilai 1 (memadai).
9	K1.LP.P03.02 Kecukupan SDM Jumlah Direksi, Pejabat dan Pegawai sudah memadai dalam menegakkan Sistem Pengendalian Pelaporan Keuangan Bank sesuai dengan kompleksitas usaha BPR/S dan memenuhi struktur dalam penerapan Tata Kelola BPR/ BPRS sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/S.	Nilai 3 (Tidak Memadai)	BPR memiliki indikator Jumlah Direksi, Pejabat dan Pegawai sudah memadai dalam menegakkan Sistem Pengendalian Pelaporan Keuangan Bank sesuai dengan kompleksitas usaha BPR/ S dan memenuhi struktur dalam penerapan Tata Kelola BPR/ BPRS sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/ S", indikator Jumlah Direksi, Pejabat dan Pegawai sudah memadai dalam menegakkan Sistem Pengendalian Pelaporan Keuangan Bank sesuai dengan kompleksitas usaha BPR/ S dan memenuhi struktur dalam penerapan Tata Kelola BPR/ BPRS sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/S", yang dinilai nilai 3 (tidak memadai).
D. Komitmen Terhadap Kompetensi			



No	Indikator	Penilaian	Keterangan
10	K1.LP.P04.01 Komitmen Terhadap Kompetensi Manajemen BPR/S memastikan bahwa penugasan Pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian internal dan kapasitas sesuai dengan tuntutan jabatan.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Manajemen BPR/ S memastikan bahwa penugasan Pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian internal dan kapasitas sesuai dengan tuntutan jabatan", pada BPR berada dalam kondisi nilai 2 (cukup memadai).
11	K1.LP.P04.02 Komitmen Terhadap Kompetensi BPR/ BPRS menyelenggarakan pelatihan dan mentoring untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengendalian internal Pelaporan Keuangan Bank bagi Pegawai terkait.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Kondisi indikator BPR/ BPRS menyelenggarakan pelatihan dan mentoring untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengendalian internal Pelaporan Keuangan Bank bagi Pegawai terkait", yang dimiliki BPR adalah nilai 2 (cukup memadai).
E. Menegakkan Akuntabilitas			
12	K1.LP.P05.01 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengendalian Internal Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai mengetahui dan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengendalian internal dalam pelaksanaan transaksi dan proses pelaporan keuangan Bank	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Implementasi indikator Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai mengetahui dan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengendalian internal dalam pelaksanaan transaksi dan proses pelaporan keuangan Bank", di BPR menunjukkan kondisi nilai 2 (cukup memadai).
13	K1.LP.P05.02 Komitmen Terhadap Kompetensi Wewenang pengendalian internal yang diberikan kepada pegawai telah tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan BPR/S.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Implementasi indikator Wewenang pengendalian internal yang diberikan kepada pegawai telah tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan BPR/ S", di BPR menunjukkan kondisi nilai 2 (cukup memadai).
Total Nilai Komponen		26	
Banyaknya Indikator		13	
Rata-rata Nilai		2	
Predikat Komponen		Nilai 2 (Cukup Memadai)	



Komponen 2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
A. Menentukan Tujuan yang Cocok			
1	K2.PR.P06.01 Tujuan Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan BPR/ BPRS telah menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank yang bertujuan untuk a. memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan; c. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan d. memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR/ BPRS telah menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank yang bertujuan untuk a. memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan; c. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan d. memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan", pada BPR berada dalam kondisi nilai 2 (cukup memadai).
B. Mengidentifikasi dan Menganalisa Risiko			
2	K2.PR.P07.01 Identifikasi Risiko BPR/ S telah mengidentifikasi dan menganalisa risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan (antara lain salah saji, kecurangan atau manipulasi laporan, window dressing, penggelembungan pencatatan dll)	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR/ S telah mengidentifikasi dan menganalisa risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan (antara lain salah saji, kecurangan atau manipulasi laporan, window dressing, penggelembungan pencatatan dll)", pada BPR dinilai nilai 2 (cukup memadai).
C. Menilai Risiko Fraud			
3	K2.PR.P08.01 Penilaian Risiko Fraud dalam Pelaporan Keuangan BPR/ S telah melakukan penilaian yang terhadap risiko fraud (kecurangan) atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan BPR.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR/S telah melakukan penilaian yang terhadap risiko fraud (kecurangan) atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan BPR", pada BPR dinilai nilai 2 (cukup memadai).



No	Indikator	Penilaian	Keterangan
4	K2.PR.P08.02 Pengujian yang dilakukan Audit Internal Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Audit Internal melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam memastikan tidak terdapat fraud (kecurangan) dalam pelaporan keuangan Bank	Nilai 2 (Cukup Memadai)	BPR memiliki indikator Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Audit Internal melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam memastikan tidak terdapat fraud (kecurangan) dalam pelaporan keuangan Bank", indikator Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Audit Internal melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam memastikan tidak terdapat fraud (kecurangan) dalam pelaporan keuangan Bank", yang dinilai nilai 2 (cukup memadai).
D. Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan yang Signifikan			
5	K2.PR.P09.01 Identifikasi dan Analisis Perubahan Signifikan BPR/ BPRS telah mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan yang dapat menimbulkan atau mengubah risiko antara lain misalnya perubahan sistem informasi, perubahan regulasi, terjadinya penggabungan usaha (merger) / akuisisi / konsolidasi, perubahan dalam sistem akuntansi yang berdampak pada integritas pelaporan keuangan Bank.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR/ BPRS telah mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan yang dapat menimbulkan atau mengubah risiko antara lain misalnya perubahan sistem informasi, perubahan regulasi, terjadinya penggabungan usaha (merger) / akuisisi / konsolidasi, perubahan dalam sistem akuntansi yang berdampak pada integritas pelaporan keuangan Bank, dengan penilaian nilai 2 (cukup memadai).
Total Nilai Komponen		10	
Banyaknya Indikator		5	
Rata-rata Nilai		2	
Predikat Komponen		Nilai 2 (Cukup Memadai)	



Komponen 3. Aktivitas Pengendalian (**Control Activities**)

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
A. Memilih dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian			
1	K3.AP.P10.01 Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian BPR/S melaksanakan kegiatan pengendalian yang melibatkan seluruh jenjang organisasi mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap proses pelaporan keuangan telah dipatuhi secara konsisten.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Indikator BPR/ S melaksanakan kegiatan pengendalian yang melibatkan seluruh jenjang organisasi mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap proses pelaporan keuangan telah dipatuhi secara konsisten", pada BPR indikator BPR/ S melaksanakan kegiatan pengendalian yang melibatkan seluruh jenjang organisasi mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap proses pelaporan keuangan telah dipatuhi secara konsisten", dinilai nilai 2 (cukup memadai).
2	K3.AP.P10.02 Penjelasan kepada Direksi secara Berkala tentang Pengendalian Pelaporan Keuangan Direksi meminta penjelasan secara berkala tentang Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan dari Kepala Unit Kerja / PE terkait untuk dapat segera mendeteksi permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian, kesalahan penyajian atau penyimpangan lainnya.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi meminta penjelasan secara berkala tentang Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan dari Kepala Unit Kerja / PE terkait untuk dapat segera mendeteksi permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian, kesalahan penyajian atau penyimpangan lainnya", yang nilai 2 (cukup memadai).



No	Indikator	Penilaian	Keterangan
3	K3.AP.P10.03 Peran UKK / PE yang Bertanggung jawab terhadap Pencegahan Kecurangan Pelaporan Keuangan Unit kerja khusus / Pejabat Eksekutif (yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti fraud) yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank, melaksanakan analisis data keuangan dan melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan luaran (output) Laporan Keuangan.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	BPR memiliki indikator Unit kerja khusus / Pejabat Eksekutif (yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti fraud) yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank Umum, melaksanakan analisis data keuangan dan melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan luaran (output) Laporan Keuangan", indikator Unit kerja khusus / Pejabat Eksekutif (yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti fraud) yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank Umum, melaksanakan analisis data keuangan dan melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan luaran (output) Laporan Keuangan", yang dinilai nilai 2 (cukup memadai).
B. Memilih dan mengembangkan Kontrol Umum atas Teknologi			
4	K3.AP.P11.01 Verifikasi Transaksi BPR/ S melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta prosedur otorisasi dalam pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR/ S melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta prosedur otorisasi dalam pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku", yang nilai 2 (cukup memadai).
5	K3.AP.P11.02 Pengendalian Teknologi BPR/ S melakukan langkah- langkah pengendalian teknologi informasi agar sistem dan data terjaga integritas dan kerahasiaannya.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR/ S melakukan langkah- langkah pengendalian teknologi informasi agar sistem dan data terjaga integritas dan kerahasiaannya", berjalan dengan nilai 2 (cukup memadai).
6	K3.AP.P11.03 Audit Internal Memastikan Efektivitas Internal Kontrol Pengamanan Data Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Audit Internal memastikan bahwa pengendalian terhadap pengamanan pusat data, pengembangan dan pemeliharaan sistem telah berjalan efektif.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Kondisi indikator Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Audit Internal memastikan bahwa pengendalian terhadap pengamanan pusat data, pengembangan dan pemeliharaan sistem telah berjalan efektif", yang dimiliki BPR adalah nilai 2 (cukup memadai).
C. Merinci ke dalam Kebijakan dan Prosedur			



No	Indikator	Penilaian	Keterangan
7	K3.AP.P12.01 Pemisahan Fungsi BPR/ S telah mengatur pemisahan fungsi (segregation of duties) sesuai dengan kewenangan atas sistem dan aplikasi yang dimiliki dalam rangka mencegah/ mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/ informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Kondisi indikator BPR/ S telah mengatur pemisahan fungsi (segregation of duties) sesuai dengan kewenangan atas sistem dan aplikasi yang dimiliki dalam rangka mencegah/ mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/ informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan", yang dimiliki BPR adalah nilai 2 (cukup memadai).
8	K3.AP.P12.02 Mekanisme Jenjang Otorisasi BPR/S telah memiliki mekanisme jenjang otorisasi dan persetujuan (approval) atas transaksi dan kejadian penting untuk menjaga integritas pelaporan keuangan Bank.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Indikator BPR/ S telah memiliki mekanisme jenjang otorisasi dan persetujuan (approval) atas transaksi dan kejadian penting untuk menjaga integritas pelaporan keuangan Bank", pada BPR saat ini nilai 2 (cukup memadai).
9	K3.AP.P12.03 Ketersediaan Job Description Pengendalian Internal Pimpinan dan Pegawai BPR/ S telah memiliki uraian jabatan (job description) yang memuat fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung jawab pengendalian internal di masing- masing jabatan / posisi.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	BPR telah mengimplementasikan indikator Pimpinan dan Pegawai BPR/ S telah memiliki uraian jabatan (job description) yang memuat fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung jawab pengendalian internal di masing-masing jabatan / posisi", yang nilai 2 (cukup memadai).
Total Nilai Komponen		18	
Banyaknya Indikator		9	
Rata-rata Nilai		2	
Predikat Komponen		Nilai 2 (Cukup Memadai)	



Komponen 4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
A. Gunakan Informasi yang Relevan			
1	K4.IK.P13.01 Ketersediaan Sistem Informasi Keuangan BPR/ BPRS memiliki sistem informasi yang mampu menyediakan Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu. Informasi keuangan merupakan setiap informasi berupa angka dan rasio keuangan. Sedangkan Laporan keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang disusun oleh Bank.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR/ BPRS memiliki sistem informasi yang mampu menyediakan Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu. Informasi keuangan merupakan setiap informasi berupa angka dan rasio keuangan. Sedangkan Laporan keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang disusun oleh Bank", BPR tergolong nilai 2 (cukup memadai).
2	K4.IK.P13.02 Pengembangan Sistem Informasi yang menerapkan Sistem Pengendalian Internal BPR/ S dalam mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi dengan menerapkan pengendalian internal agar kegunaan dan keandalan informasi keuangan dan/ laporan keuangan terjaga integritasnya.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR/ S dalam mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi dengan menerapkan pengendalian internal agar kegunaan dan keandalan informasi keuangan dan/ laporan keuangan terjaga integritasnya", berjalan dengan nilai 2 (cukup memadai).
B. Komunikasi Internal yang Efektif			
3	K4.IK.P14.01 Memiliki Sistem Komunikasi yang Efektif BPR/S memiliki sistem komunikasi yang efektif di setiap tingkatan organisasi untuk memastikan Manajemen dan pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	BPR memiliki indikator BPR/ S memiliki sistem komunikasi yang efektif di setiap tingkatan organisasi untuk memastikan Manajemen dan pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya", indikator BPR/ S memiliki sistem komunikasi yang efektif di setiap tingkatan organisasi untuk memastikan Manajemen dan pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya", yang dinilai nilai 2 (cukup memadai).
4	K4.IK.P14.02 Penyelenggaraan dan Akses Komunikasi Internal BPR/ S menyelenggarakan saluran komunikasi yang efektif agar Informasi Keuangan dan / atau Laporan Keuangan dapat dijangkau atau diakses oleh pegawai yang berkepentingan.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR/ S menyelenggarakan saluran komunikasi yang efektif agar Informasi Keuangan dan / atau Laporan Keuangan dapat dijangkau atau diakses oleh pegawai yang berkepentingan", BPR tergolong nilai 2 (cukup memadai).
C. Komunikasi Eksternal yang Efektif			



No	Indikator	Penilaian	Keterangan
5	K4.IK.P15.01 Saluran Komunikasi yang Terbuka BPR/ BPRS membuka saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan OJK, BPKP, Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik, Konsultan yang memberikan masukan yang signifikan terhadap peningkatan integritas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR/ BPRS membuka saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan OJK, BPKP, Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik, Konsultan yang memberikan masukan yang signifikan terhadap peningkatan integritas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan", dengan pencapaian nilai 2 (cukup memadai).
Total Nilai Komponen		10	
Banyaknya Indikator		5	
Rata-rata Nilai		2	
Predikat Komponen		Nilai 2 (Cukup Memadai)	



Komponen 5. Pemantauan (**Monitoring**)

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
A. Melakukan Evaluasi yang sedang berjalan dan/atau Terpisah			
1	K5.PM.P16.01 Evaluasi Sistem Pengendalian Pelaporan Keuangan Bank BPR/ BPRS melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan teknologi informasi	Nilai 2 (Cukup Memadai)	BPR memiliki indikator BPR/ BPRS melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan teknologi informasi", indikator BPR/ BPRS melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan teknologi informasi", yang dinilai nilai 2 (cukup memadai).
2	K5.PM.P16.02 Integrasi Sistem Pengendalian Internal BPR/BPRS mengintegrasikan sistem pengendalian internal ke dalam kegiatan operasional dan bisnis agar mampu menyediakan laporan rutin termasuk Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan secara akurat dan benar.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Indikator BPR/ BPRS mengintegrasikan sistem pengendalian internal ke dalam kegiatan operasional dan bisnis agar mampu menyediakan laporan rutin termasuk Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan secara akurat dan benar", pada BPR saat ini nilai 2 (cukup memadai).
B. Mengevaluasi dan Mengkomunikasikan Kekurangan (defisiensi)			
3	K5.PM.P17.01 Evaluasi Kekurangan Pengendalian Internal BPR/ S melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian terutama pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul dalam penyusunan Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	BPR memiliki indikator BPR/ S melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian terutama pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul dalam penyusunan Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank", indikator BPR/ S melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian terutama pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul dalam penyusunan Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank", yang dinilai nilai 2 (cukup memadai).



No	Indikator	Penilaian	Keterangan
4	K5.PM.P17.02 Pelaporan Kekurangan Pengendalian Internal Kelemahan dalam sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang diidentifikasi Unit kerja, Unit Kerja Khusus / PE yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank, Audit Internal maupun Satuan Kerja lainnya segera dilaporkan ke Direksi. Sedangkan kelemahan pengendalian internal yang bersifat material dilaporkan ke Dewan Komisaris.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Kondisi indikator Kelemahan dalam sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang diidentifikasi Unit kerja, Unit Kerja Khusus / PE yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank, Audit Internal maupun Satuan Kerja lainnya segera dilaporkan ke Direksi. Sedangkan kelemahan pengendalian internal yang bersifat material dilaporkan ke Dewan Komisaris", yang dimiliki BPR adalah nilai 2 (cukup memadai).
5	K5.PM.P17.03 Pelaporan ke OJK Jika Terdapat Kelemahan yang membahayakan Kondisi Bank Direksi, Dewan Komisaris BPR, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif, dan/ atau pihak lain telah memahami bahwa dalam hal diketahui terdapat kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dalam proses pelaporan keuangan Bank, harus memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi, Dewan Komisaris BPR, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak lain telah memahami bahwa dalam hal diketahui terdapat kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dalam proses pelaporan keuangan Bank, harus memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan", BPR tergolong nilai 2 (cukup memadai).
Total Nilai Komponen		10	
Banyaknya Indikator		5	
Rata-rata Nilai		2	
Predikat Komponen		Nilai 2 (Cukup Memadai)	



Analisa dan Kesimpulan

No	Komponen	Nilai
1	Lingkungan Pengendalian (<i>Control Environment</i>)	Nilai 2 (Cukup Memadai)
2	Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>)	Nilai 2 (Cukup Memadai)
3	Aktivitas Pengendalian (<i>Control Activities</i>)	Nilai 2 (Cukup Memadai)
4	Informasi dan Komunikasi (<i>Information and Communication</i>)	Nilai 2 (Cukup Memadai)
5	Pemantauan (<i>Monitoring</i>)	Nilai 2 (Cukup Memadai)
Total Nilai Seluruh Indikator Komponen		74
Banyaknya Indikator Komponen		37
Rata-rata Nilai		2
Peringkat Self Assessment		2
Predikat Self Assessment		Peringkat 2 (Cukup Memadai)

Analisa dan Kesimpulan

Kualitas 5 (lima) Komponen COSO pengendalian internal yaitu (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi & Komunikasi; (5) Pemantauan, secara umum cukup memadai dan membutuhkan perbaikan cukup signifikan agar dapat memberikan kontribusi secara berkesinambungan terhadap peningkatan kualitas pengendalian internal pada level yang dapat diterima.

LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GCG) PT. BPR
SUNGKUNANDHANA TAHUN 2024



Jl. K.H Mansyur No. 20 Juwana Pati TELEPON:
0295-471167



PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT. BPR Sungkunandhana pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPR Sungkunandhana memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Sungkunandhana dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Surabaya. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Sungkunandhana didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Sungkunandhana.

BPR Sungkunandhana telah beroperasi lebih dari 25 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Sungkunandhana selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, BPR Sungkunandhana terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.



LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT. BPR Sungkunandhana
Alamat	Jl. K.H Mansyur No. 20 Juwana Pati
Nomor Telepon	0295-471167
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Peringkat Komposit	2
Predikat Komposit	Baik
Kesimpulan / Penjelasan	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Sutadi ,S.E.
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Bertanggungjawab penuh kepada Dewan Komisaris atas perkembangan operasional BPR yang dipimpinnya 2. Melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) terhadap pekerjaan petugas bank, yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas operasional maupun administrative baik di pusat maupun dicabang 3. Melakukan pembinaan terhadap nasabah inti, baik nasabah peminjam maupun nasabah penabung. 4. Memantau angka – angka keragaan (performance) BPR dalam kaitanya dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. 5. Membina hubungan baik dengan pejabat instansi pemerintah, tokoh – tokoh masyarakat, pemuka agama dan tokoh adat setempat. 6. Menjalankan dan melaksanakan ketentuan – ketentuan yang diberlakukan / dikeluarkan oleh pemerintah tentang perbankan. 7. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan BPR dan rencana kerja mengenai penagihan tunggakan bagi masing – masing pemasaran. 8. Membuat laporan perkembangan BPR setiap bulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dewan komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan. 9. Membina hubungan dan kerjasama yang baik diantara sesama karyawan dengan sasaran untuk lebih meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 10. Menetapkan wewenang direktur untuk memfiat maksimum jumlah kredit per nasabah, pemberian wewenang memutus jumlah maksimum kredit kepada Direktur pernasabah harus melalui SK tersendiri.		



2.	Nama	:	Ayudi ,S.E.
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain; 4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 5. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan 6. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR;		
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :		
	Dewan komisaris melaksanakan pengawasan dan nasihat kepada anggota direksi		
	Penjelasan Lebih Lanjut :		
	Nihil		

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Maruhum TH Malau, SE
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Mengawasi baik langsung maupun tidak langsung atas pekerjaan dan tindakan Direksi mengenai pengelolaan usaha dan atas pertanggung jawaban harta kekayaan perusahaan. 2. Memberikan saran dan nasihat kepada Direksi mengenai cara – cara penyelesaian permasalahan yang timbul dalam perseroan baik yang berkaitan dengan kegiatan intern maupun eksetern. 3. mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR. 4. Memberikan ijin / persetujuan kepada Direksi dalam hal – hal yang diluar wewenang dan tanggungjawabnya. 5. Menciptakan dan membina hubungan baik dengan para relasi dan instansi yang terkait maupun antar sesame yang terkait dalam intern perseroan. 6. Memberhentikan sementara Direksi apabila melakukan penyimpangan sebagaimana ketentuan dalam Akta pendirian & AD Perseroan. 7. Mengisi jabatan Direksi yang lowong selama pengganti yang baru belum didapatkan.		
2.	Nama	:	Suhari, SE
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		



1. Mengawasi baik langsung maupun tidak langsung atas pekerjaan dan tindakan Direksi mengenai pengelolaan usaha dan atas pertanggung jawaban harta kekayaan perusahaan.
2. Memberikan saran dan nasihat kepada Direksi mengenai cara – cara penyelesaian permasalahan yang timbul dalam perseroan baik yang berkaitan dengan kegiatan intern maupun eksetern.
3. mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR.
4. Memberikan ijin / persetujuan kepada Direksi dalam hal – hal yang diluar wewenang dan tanggungjawabnya.
5. Menciptakan dan membina hubungan baik dengan para relasi dan instansi yang terkait maupun antar sesame yang terkait dalam intern perseroan.
6. Memberhentikan sementara Direksi apabila melakukan penyimpangan sebagaimana ketentuan dalam Akta pendirian & AD Perseroan.
7. Mengisi jabatan Direksi yang lowong selama pengganti yang baru belum didapatkan.

Rekomendasi Kepada Direksi :

Memberikan saran dan nasihat kepada Direksi mengenai cara – cara penyelesaian permasalahan yang timbul dalam perseroan baik yang berkaitan dengan kegiatan intern maupun ekstern

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

C. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sutadi ,S.E.	Rp0	0%
2.	Ayudi ,S.E.	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR			



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sutadi ,S.E.	-	-	0%
2.	Ayudi ,S.E.	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Dewan komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR				

D. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Sutadi ,S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ayudi ,S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Sutadi ,S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ayudi ,S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR.				



E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Maruhum TH Malau, SE	Rp0	0%
2.	Suhari, SE	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Maruhum TH Malau, SE	-	-	0%
2.	Suhari, SE	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain				

F. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Maruhum TH Malau, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Suhari, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan pada BPR				



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Maruhum TH Malau, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Suhari, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan komisaris tidak ada hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua				

G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp283.800.000	2	Rp204.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp53.212.500	0	Rp0
3.	Tantiem	2	Rp25.317.315	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp4.800.000	0	Rp0
Total			Rp367.129.815		Rp204.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Nihil					



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tunjangan Perumahan (2)	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2), BPJS Ketenagakerjaan (2)	BPJS Kesehatan (2), BPJS Ketenagakerjaan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Pulsa (2)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dewan Direksi dan Dewan Komisaris diberikan fasilitas yang telah ditetapkan oleh RUPS			

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji Dewan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS	

I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	14 Maret 2024	2	- Pendidikan dan pelatihan penerapan program APUPPT dan PPPSPM - Kompetensi SDM
2.	28 Juni 2024	2	- Evaluasi kebijakan direksi - Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris atas



			rapat sebelumnya
3.	06 September 2024	2	-Evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank -Isu - isu strategis
4.	31 Oktober 2024	2	- Pelaksanaan APUPPT dan PPPSPM - Evaluasi Baki debit dan Tunggalan
5.	04 Desember 2024	2	Penetapan rencana bisnis tahun 2025
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 5 (lima) kali dalam setahun di sepanjang tahun 2024.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Maruhum TH Malau, SE	5	0	100%
2.	Suhari, SE	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Semua rapat Dewan Komisaris dihadiri lengkap oleh anggota Dewan Komisaris.				



J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak ada penyimpangan								

K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Belum ada permasalahan hukum yang dihadapi		

L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			



1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Nihil							

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil					